

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH SEBAGAI SUMBER PAD PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Oleh : Drs. Yonathan Palinggi,MM
Peneliti adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ketua Program Studi
Pasca Sarjana Manajemen Administrasi Publik Unikarta

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas dan diterima sejak tanggal 1 Januari 2001 perlu disikapi dengan cepat oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Kewenangan yang lebih luas dalam desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah menyangkut aspek-aspek administrasi, kelembagaan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan harus segera direalisasikan, termasuk pengelolaan sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Sumber-sumber pendapatan potensi yang dimiliki daerah akan menentukan tingkat kemampuan keuangannya. Salah satu jenis pajak setelah pelaksanaan otonomi daerah adalah Pajak pengambilan bahan galian golongan C, yang pada akhirnya menjadi sumber pemasukan PAD bagi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya.

Kata Kunci : PAD dan Pajak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C adalah merupakan komponen yang penting dalam pengalokasian sumber keuangan daerah maupun keuangan negara yang dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan oembangunan daerah. Otonomi daerah dapat melahirkan paradigman baru yang dapat membentuk terwujudnya pelaksanaan Pemerindah di daerah, khususnya pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C sebagai salah satu sumber utama dalam menunjang pembangunan dalam segala bidang. Hal ini merupakan wujud perubahan sistem penataan ketatanegaraan yang dulu bersifat sentralisasi dan kini telah mengalami banyak perubahan mengenai sistem pemerintahan secara desentralisasi.

Maksud dari pemberian otonomi daerah adalah untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan,

dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan adanya kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin manta, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri, yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah ada peningkatan / pertumbuhan pajak pengambilan bahan galian golongan C sebelum dan sesudah Otonomi terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) Apakah ada hubungan peningkatan / pertumbuhan penerimaan pajak bahan galian golongan C terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) Berapa besarnya kontribusi penerimaan pajak bahan galian golongan C terhadap PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1. Tinjauan Pustaka

a. Sebelum UU No. 34 Tahun 2000

Dalam statusnya retribusi daerah tingkat I dahulu pemungutannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dibawah koordinasi dan pengawasan oleh pemerintah daerah tingkat I dengan sistem bagi hasil.

b. UU No. 34 Tahun 2000

Pemberlakuan Undang-undang yang disebut sebagai reformasi perpajakan, tiga tahun masa berlaku masa efektifnya belum memberikan hasil yang menguntungkan bagi 50 Kabupaten Kota khususnya. Pada saat sekarang sebagai pajak, pemungutan pengambilan bahan galian golongan C dapat dilakukan sesuai prosedur yang diharuskan sebagaimana ketentuan pemungutan pajak

sesuai dengan Undang-Undang. Pemerintah Daerah sepertinya sangat patut pada ketentuan walaupun harus kehilangan pendapatan dalam jumlah yang cukup besar.

c. Otonomi Daerah

Bagir Manan (dalam Andi Masturi : 39), menyatakan " Otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri " .

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Pengertian Pajak Negara dan Pajak Daerah

- 1) Pajak Negara, yang termasuk dalam pajak negara antara lain :
 - a. Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
 - c. Bea Materai
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan
 - e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 2) Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
- 3) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau bada.

e. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut : "Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. (Abdul Halim (2001 : 10).

f. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayahnya dipungut langsung oleh daerah yang terdiri dari pajak daerah dan Retribusi Daerah.

g. Pembagian Pajak Daerah

- 1) Pajak Daerah Tingkat I
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- 2) Pajak Daerah Tingkat II
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C.
 - g. Pajak Parkir

h. Jenis-jenis Retribusi Daerah

- 1) Retribusi Jasa Umum.
- 2) Retribusi Jasa Usaha.
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu.

2. Hipotesis

Hipotesis yang diusulkan dalam penulisan ini adalah hipotesis matematika yang dapat diverbalkan sebagai berikut :

- a. $H_0 : \mu_1 \geq \mu_2$
- b. $H_1 : \mu_1 < \mu_2$

Dari hipotesis di atas dapat diverbalkan, menjadi :

- a. H_0 : rata-rata peningkatan/pertumbuhan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C terdapat perbedaan secara signifikan dengan rata-rata peningkatan / pertumbuhan penerimaan pajak bahan galian golongan C setelah Otonomi Daerah.
- b. H_a : rata-rata peningkatan/pertumbuhan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C terdapat perbedaan secara signifikan dengan rata-rata peningkatan / pertumbuhan penerimaan pajak bahan galian golongan C sebelum Otonomi Daerah.
- c. Diduga pula bahwa kontribusi penerimaan Pajak Bahan galian Golongan C terhadap PAD kecil, dan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD.

C. METODE PENELITIAN

1. Identifikasi Variabel

Setelah dilakukan uji regresi berganda melalui program SPSS ver. 10 dan ver. 11, antara variabel terikat terhadap variabel bebasnya ternyata diantara variabel tersebut tidak memiliki hubungan yang kuat sehingga pengujian dengan menggunakan uji regresi berganda dengan bantuan

perangkat lunak SPSS tidak dapat dilanjutkan.

2. Definisi Operasional

- 1) Pajak tambang galian C adalah pajak atas pengambilan bahan galian golongan C yang berasal dari batuan, maupun tanah, yang berasal dari tubuh bumi.
- 2) Perusahaan pengembang adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang kegiatan pokoknya menggali dan menjual hasil galian batuan maupun tanah yang berasal dari tubuh bumi hasil dikenakan pajak 20%.
- 3) Penerimaan Pajak adalah penerimaan negara atau daerah yang berasal dari wajib pajak guna membiayai pengeluaran umum pemerintah.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

- 1) Sumber Data
 - a. Data Primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari obyek penelitian.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu diperoleh dari berbagai literatur maupun dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti
- 2) Teknik Pengumpulan Data
 Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan dengan cara melakukan wawancara dan melakukan observasi keobyek yang diamati / diteliti.

4. Metode Analisis

Metode yang analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis statistik Deskriptif, sebagai berikut :

- 1) Analisis Rasio antrara PAD terhadap APBD.

$$PPAD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi APBD}} \times 100 \%$$

PPAD : Peranan PAD

- 2) Analisis Tingkat Pertumbuhan Pajak Pengambilan Bahan Galian C.

$$TP\ PADt = \frac{\text{Realisasi PBGGC}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

P.B.B.G.G.C : Penerimaan bahan Galian Golongan C

- 3) Analisis Efisiensi Biaya Rutin Terhadap PAD

$$\text{Efisiensi} : \frac{\text{Biaya Rutin}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Dimana :

Biaya pengumpulan PAD adalah biaya untuk memperoleh PAD diasumsikan berasal dari pengeluaran rutin Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan realisasi PAD adalah realisasi penerimaan sumber-sumber PAD

Tabel 1.
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentasi kinerja keuangan	kriteria
100 % ke atas	Tidak Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
70 % - 80 %	Efisien
60 % ke bawah	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan Kinerja Keuangan. 1997

- 4) Contribusi Pajak Badan Galian C Terhadap PAD

$$CPBGGC = \frac{\text{Realisasi Pajak Bahan Galian Gol C.}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dimana :

CPBGGC : Contribusi Pajak Bahan Galian Golongan C

- 5) Analisis Efektivitas Pengelolaan PAD

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target}} \times 100\%$$

6) Analisis perbedaan dan hubungan sebelum dan sesudah Otonomi Daerah :

a) Uji beda (Uji t)

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_{X_1}^2 - S_{X_2}^2}}$$

Keterangan :

t : harga t

X_1 : rata-rata peningkatan/pertumbuhan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C sebelum dan sesudah otonomi daerah.

X_2 : rata-rata peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak setelah otonomi daerah

S_{X_1} : standar deviasi peningkatan/pertumbuhan penerimaan pajak sebelum otonomi daerah.

S_{X_2} : standar deviasi peningkatan/pertumbuhan penerimaan pajak setelah otonomi daerah.

b) Untuk pengujian hipotesis selanjutnya agar dapat memberikan informasi bahwa tidak /terdapat perbedaan peningkatan / pertumbuhan penerimaan pajak bahan galian golongan C sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Daerah. Pembuktiannya dengan menggunakan t-test (related) berpasangan, dengan rumus :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} \left[\frac{S_1}{\sqrt{n_1}} \right] \left[\frac{S_2}{\sqrt{n_2}} \right]}}$$

D. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kabupaten yang

Analisis Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah Sebagai

Sumber PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

terdapat di Propinsi Kalimantan Timur dan beribukota Kabupaten di Kota Tenggarong.

Secara administrasi Kab. Kutai Kartanegara memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara bertasan dengan Kota Samarinda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Samarinda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

2. Kondisi Keuangan Daerah

Sebagai suatu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting dan strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, selalu diupayakan adanya peningkatan PAD dan merupakan salah satu pencerminan dan keikutsertaan daerah dalam membina penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah.

E. ANALISIS DATA & PEMBAHASAN

1. Analisis Data

1) Beberapa Perbedaan Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Otoda

a. Ratio antara Pendapatan Asli Daerah Sebelum pemberlakuan Otonomi Daerah adalah :

Tabel 2. Rasio PAD Terhadap APBD Tahun Anggaran 1997 - 2000

Tahun Anggr	Realisasi PAD	Realisasi APBD	Peranan	Pertumb PAD (%)	Pertumb APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4) 2 : 3x100%	(5)	(6)
1997	10.291.435.906,74	67.539.886.536,41	15,24	26,97	21,66
1998	10.453.922.955,41	78.719.393.630,73	13,28	1,62	16,96
1999	13.492.993.267,78	101.962.869.391,60	13,23	29,80	30,27
2000	10.979.720.353,40	108.141.145.452,26	10,15	-19,10	6,21
Jml	45.218.072.483,33	356.363.295.010,99	51,90	39,29	75,10
Rata	11.304.518.120,83	89.090.823.752,75	12,98	9,82	18,78

Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data telah diolah)

Dari Tabel 1 & 2 menunjukkan bahwa peranan PAD terhadap APBD relatif kecil, hal ini bukan berarti tidak mempunyai

peranan, tetapi sumber-sumber PAD yang lain harus dimaksimalkan sehingga secara bersama-sama dari sumber PAD yang lain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

b. Ratio antara Pendapatan Asli Daerah Setelah pemberlakuan Otonomi Daerah adalah :

Tabel 3. Rasio PAD Terhadap APBD Tahun Anggaran 2001 - 2003

Tahun Anggr	Realisasi PAD	Realisasi APBD	Peranan	Pertumb PAD (%)	Pertumb APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4) 2 : 3x100%	(5)	(6)
2001	30.727.321.860,65	399.433.505.848,62	7,69	184,36	276,09
2002	46.942.161.266,60	519.777.576.637,98	9,03	53,10	30,88
2003	56.568.480.750,70	762.085.459.744,53	7,42	2,21	47,79
Jml	134.237.963.877,95	1.681.296.542.231,13	24,15	239,67	354,76
Rata	44.745.987.959,32	560.432.180.743,71	8,05	79,89	118,25

Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah)

c. Analisis Kontribusi Pajak Galian Gol. C Terhadap PAD Sebelum Otonomi Daerah adalah :

Tabel 4. Kontribusi Pajak Galian C Terhadap PAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 1997 - 2000

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Bahan Galian C	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi
(1)	(2)	(3)	2:3 x 100%
1997	85.262.205,05	10.291.435.906,74	0,83
1998	145.445.619,46	10.453.922.955,41	1,39
1999	89.648.658,75	13.492.993.267,78	0,66
2000	84.558.909,75	10.979.720.353,40	0,77
Jml	404.915.394,01	45.218.072.483,33	3,65
Rata	101.228.848,50	11.304.518.120,83	0,91

Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah)

d. Analisis Kontribusi Pajak Galian Gol. C Terhadap PAD Sesudah Otonomi Daerah adalah :

Tabel 5. Kontribusi Pajak Galian C Terhadap PAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2001 - 2003

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Bahan Galian C	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi
(1)	(2)	(3)	2:3 x 100%
2001	95.132.940,00	30.727.321.860,65	0,31
2002	218.635.529,70	46.942.161.266,60	0,47
2003	247.425.831,45	56.568.480.750,75	0,44
Jml	561.194.301,15	134.237.963.877,95	1,21
Rata	187.064.767,05	44.745.987.959,32	0,40

Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah)

Dari tabel 4 dan 5 menunjukkan terdapat perbedaan kontribusi pajak sebelum dan

Analisis Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah Sebagai Sumber PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

sesudah pelaksanaan Otonomi Daerah, namun demikian bukan berarti tidak ada peningkatan penerimaan pajak dari bahan galian Golongan C, karena PAD merupakan total penerimaan pajak daerah, sedang pajak bahan galian C adalah bagian kecil dari Pendapatan Asli Daerah.

2) **Persentase peranan Pajak Bahan Galian C, Pertumbuhan Pajak Pengambilan Bahan Galian C, maupun pertumbuhan PAD**

a. Peranan, Pertumbuhan Pajak Galian C Terhadap PAD sebelum pemberlakuan Otonomi Daerah adalah :

Tabel 6. Peranan Pajak Galian C Terhadap PAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 1997 - 2000

Tahun Anggr	Realisasi Pajak G.C.	Realisasi PAD	Peranan Pajak G.C.(%)	Pertumb Pajak G.C (%)	Pertumb PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4) 2 : 3x100%	(5)	(6)
1997	81.202.101,00	10.291.435.906,74	0,83	19,89	27,63
1998	138.519.637,58	10.453.922.955,41	1,39	74,12	1,66
1999	85.379.675,00	13.492.993.267,78	0,66	-40,28	30,52
2000	80.532.295,00	10.979.720.353,40	0,77	-5,96	-19,56
Jml	385.633.708,58	45.218.072.483,33	3,65	47,76	40,25
Rata	96.408.427,15	11.304.518.120,83	0,91	11,94	10,06

Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah)

b. Peranan, Pertumbuhan Pajak Galian C Terhadap PAD sesudah pemberlakuan Otonomi Daerah adalah :

Tabel 7. Peranan Pajak Galian C Terhadap PAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2001 - 2003

Tahun Anggr	Realisasi Pajak G.C.	Realisasi PAD	Peranan Pajak G.C.(%)	Pertumb Pajak G.C (%)	Pertumb PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4) 2 : 3x100%	(5)	(6)
2001	95.132.940,00	30.727.321.860,65	0,31	13,13	188,85
2002	218.635.529,70	46.942.161.266,60	0,47	136,31	54,39
2003	247.425.831,45	56.568.480.750,70	0,44	13,83	2,27
Jml	561.194.301,15	134.237.963.877,95	1,21	163,26	245,51
Rata	187.064.767,05	44.745.987.959,32	0,40	54,42	81,84

Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah)

Dari tabel 8 dan 9 menunjukkan bahwa peranan bahan pajak bahan galian C terhadap PAD relatif kecil, hal ini bukan berarti tidak mempunyai peranan terhadap PAD melainkan disebabkan meningkatnya sumber-sumber PAD untuk semua dinas, jika dibandingkan dengan pajak pengambilan bahan golongan C yang relatif kecil, karena pajak pengambilan bahan golongan C

merupakan bagian kecil dari sumber PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Uji Beda Pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah Otonomi

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{SX_1^2 - SX_2^2}} = \frac{9,82 - 79,89}{23,64 - 96,27} = 0,96$$

3) Analisis Efisiensi

Tabel 8. Analisis Efisiensi Biaya Terhadap PAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 1997 - 2000.

Thn Anggr (1)	Biaya Rutin (2)	Realisasi PAD (3)	(%)	Ket. Hasil Penilaian
1997	45.500.770.139,09	10.542.446.538,61	453,18	523,33 (tidak efisien)
1998	52.195.469.677,74	10.708.896.686,03	511,77	
1999	68.088.692.079,24	13.822.090.664,55	517,23	
2000	65.465.123.229,24	11.247.518.410,80	611,14	
Jml	231.250.082.125,30	46.320.952.299,99	2.093,32	
Rata	57.812.520.531,33	11.580.238.075,00	523,33	

Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah)

Tabel 9. Analisis Efisiensi Biaya Terhadap PAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2001 - 2003.

Thn Anggr (1)	Biaya Rutin (2)	Realisasi PAD (3)	(%)	Ket. Hasil Penilaian
2001	234.507.029,40	31.476.768.735,30	763,65	634,55 (tidak efisien)
2002	297.911.772,90	48.087.092.029,20	639,07	
2003	283.210.043,55	57.948.199.793,40	500,95	
Jml	815.628.845,85	137.512.060.557,90	1.903,66	
Rata	271.876.281,95	45.837.353.519,30	634,55	

Sumber Data : Pemkab. Kutai Kartanegara (data diolah)

Tabel 9 menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan persentase tingkat efisiensi sebelum dan sesudah otonomi daerah, maka jauh lebih efisien sebelum otonomi daerah dibandingkan dengan sesudah pemberlakuan otonomi daerah, hal ini terbukti bahwa persentase biaya sebelum otonomi daerah jauh lebih kecil dibandingkan biaya rutin setelah otonomi daerah.

4) Analisis Uji Beda dan Uji t

a. Uji Beda Realisasi APBD sebelum dan sesudah Otonomi

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{SX_1^2 - SX_2^2}} = \frac{18,78 - 118,25}{10,27 - 140,29} = 0,77$$

c. Uji Beda Peranan PAD sebelum dan sesudah Otonomi

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{SX_1^2 - SX_2^2}} = \frac{12,98 - 8,05}{2,17 - 0,86} = 3,75$$

d. Uji Kontribusi Pajak Bahan Galian Golongan C terhadap PAD sebelum dan sesudah Otonomi

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{SX_1^2 - SX_2^2}} = \frac{0,91 - 0,40}{0,34 - 1,27} = -0,55$$

e. Uji Pertumbuhan Pajak Galian Golongan C terhadap PAD sebelum dan sesudah Otonomi

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{SX_1^2 - SX_2^2}} = \frac{11,94 - 54,42}{41,90 - 245,26} = 0,21$$

f. Uji Peranan Pajak Bahan Galian Golongan C sebelum dan sesudah Otonomi

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{SX_1^2 - SX_2^2}} = \frac{0,91 - 0,40}{0,35 - 0,11} = 2,11$$

g. Uji Efektivitas PAD sebelum dan sesudah Otonomi

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{SX_1^2 - SX_2^2}} = \frac{523,33 - 634,55}{65,33 - 134,61} = 1,61$$

Untuk menentukan ada tidaknya hubungan yang signifikan antara pajak bahan galian golongan C sebelum dan sesudah pemberlakuan Otonomi Daerah, selanjutnya dilakukan uji t sebagai berikut :

- a. Realisasi APBD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah

$$t = \frac{18,78 - 118,25}{\sqrt{\frac{98,04}{4} + \frac{18.279,92}{3} - 2.0,77 \left[\frac{10,02}{\sqrt{4}} \times \frac{136,94}{\sqrt{3}} \right]}}$$

$$t = -1,34$$

- b. Pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah

$$t = \frac{9,82 - 79,89}{\sqrt{\frac{519,37}{4} + \frac{8.617,23}{3} - 2.0,96 \left[\frac{23,07}{\sqrt{4}} \times \frac{93,98}{\sqrt{3}} \right]}}$$

$$t = -1,65$$

- c. Peranan PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah

$$t = \frac{12,98 - 8,5}{\sqrt{\frac{4,39}{4} + \frac{0,69}{3} - 2.3,75 \left[\frac{2,12}{\sqrt{4}} \times \frac{0,84}{\sqrt{3}} \right]}}$$

$$t = 3,09$$

- d. Kontribusi Pajak bahan galian golongan C terhadap PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah

$$t = \frac{0,91 - 0,40}{\sqrt{\frac{0,10}{4} + \frac{1,50}{3} - 2.0,55 \left[\frac{0,33}{\sqrt{4}} \times \frac{1,24}{\sqrt{3}} \right]}}$$

$$t = -0,63$$

- e. Pertumbuhan pajak bahan galian golongan C terhadap PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah

$$t = \frac{11,94 - 54,42}{\sqrt{\frac{1.631,81}{4} + \frac{55.923,60}{3} - 2.0,21 \left[\frac{40,90}{\sqrt{4}} \times \frac{239,42}{\sqrt{3}} \right]}}$$

$$t = -0,21$$

- f. Peranan Pajak bahan galian Golongan C sebelum dan sesudah Otonomi Daerah

$$t = \frac{0,91 - 0,40}{\sqrt{\frac{0,10}{4} + \frac{0,01}{3} - 2.2,11 \left[\frac{0,16}{\sqrt{4}} \times \frac{0,05}{\sqrt{3}} \right]}}$$

$$t = 0$$

- g. Efektifitas PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah

$$t = \frac{523,33 - 634,55}{\sqrt{\frac{3.968,10}{4} + \frac{16.842,12}{3} - 2.1,61 \left[\frac{63,78}{\sqrt{4}} \times \frac{131,41}{\sqrt{3}} \right]}}$$

$$t = -3,27$$

2. Pembahasan

Berdasarkan perhitungan dengan Uji-t didapatkan bahwa rata-rata dari ketujuh variabel menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} hal ini berarti terdapat perbedaan peningkatan / pertumbuhan APBD maupun PAD setelah adanya otonomi Daerah, serta adanya hubungan yang signifikan antara kontribusi, pertumbuhan, dan peranan Pajak Bahan galian Golongan C terhadap PAD sebelum dan sesudah otonomi. Serta adanya hubungan yang signifikan antara Efisiensi Biaya terhadap PAD sebelum dan sesudah otonomi. Hal ini berarti **Hipotesis Ho diterima dan Ha Ditolak.**

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- 1) Uji beda realisasi APBD sebelum Otonomi Daerah dengan uji realisasi sesudah Otonomi Daerah menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan, yaitu lebih besar setelah adanya Otonomi Daerah sebesar 99,48% (118,25% - 18,78%). Jika dihubungkan dengan t tabel untuk uji dua pihak, maka terbukti t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a Ditolak.
- 2) Uji beda realisasi peningkatan / pertumbuhan penerimaan PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan, yaitu lebih besar realisasi PAD setelah adanya otonomi Daerah dengan perbedaan sebesar 70,07% (79,89% - 9,82%). Jika dihubungkan dengan t tabel untuk uji dua pihak, maka terbukti t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a Ditolak.
- 3) Uji beda realisasi peranan pajak bahan galian C terhadap PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah menunjukkan adanya perbedaan sebesar 4,93% (12,98% -8,05%). Hal ini wajar sebab pajak bahan galian golongan C merupakan bagian kecil dari PAD, namun Jika dihubungkan dengan t tabel untuk uji dua pihak, maka terbukti t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a Ditolak.
- 4) Uji beda kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap PAD sebelum dan setelah Otonomi menunjukkan adanya perbedaan sebesar 0,93% (1,27% - 0,34%) hal ini jika dihubungkan dengan t tabel untuk uji dua pihak, maka terbukti t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a Ditolak.
- 5) Uji beda pertumbuhan/peningkatan penerimaan pajak bahan galian golongan C terhadap PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 203,36% (245,26% - 41,90%). Jika dihubungkan dengan t tabel untuk uji dua pihak, maka terbukti t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a Ditolak.
- 6) Uji peranan pajak bahan galian golongan C terhadap terhadap PAD sebelum dan sesudah Otonomi Daerah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 0,24% (0,35% - 0,11%). Ini bukan berarti peranan pajak bahan galian golongan C lebih baik sebelum otonomi daerah, namun kita harus sadar dan maklum bahwa pajak bahan galian golongan C, itu merupakan bagian kecil dari PAD sehingga tidak begitu berperan terhadap PAD, namun jika dihubungkan dengan t tabel untuk uji dua pihak, maka terbukti t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a Ditolak.
- 7) Uji beda efisiensi biaya untuk mendapatkan PAD, mengalami peningkatan / perkembangan sebesar 67,63% (131,41% - 63,78%), jika dihubungkan dengan t tabel untuk uji dua pihak, maka terbukti t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , sehingga dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a Ditolak.

2. Saran

- 1) Diharapkan agar keberhasilan selama ini dalam arti pencapaian target yang diperoleh dapat ditingkatkan, sehingga penerimaan pajak dari bahan galian golongan C ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.
- 2) Perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan yang seksama pada setiap fungsi sehingga dapat dapat menciptakan daya guna dan hasil guna yang

bermanfaat untuk kemaslahatan pembangunan daerah.

- 3) Belanja rutin yang dikeluarkan setiap bulan itu, hendaknya dimaksimalkan dalam pengertian dibarengi dengan upaya-upaya untuk memperoleh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, juga perlu ditingkatkan sehingga sebanding dengan biaya rutin yang dikeluarkan pemerintah setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta
- _____, *Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta.
- Bambang Kesit Prakosa. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit UII. Press, Yogyakarta.
- Dedy Supriyadi Bratakusumah. 2002. *Otonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Penerbit Ghalia Pustaka
- Djarwanto. 1996. *Mengenal Beberapa Uji Statistik Dalam Penelitian*. Liberty, Yogyakarta.
- Irianto Agus. 2004. *Statistika Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Penerbit, Prenda Media, Jakarta.
- Jhingan, ML. 1988. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (terjemahan Guritno)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kaho Riwu Josep. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggarannya*. Rajawali Press, Jakarta.
- Komaruddin. 1989. *Pembiayaan Keuangan Pusat dan Daerah*, UGM. Press, Yogyakarta.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
- Munawir, H.S. 2000. *Perpajakan*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Munandar. 2000. *Budgetting*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Riduwan. 2003. *Dasar-dasar Statistika*. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2003. *Statistika Penelitian*. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Supriadi Bratakusumah, Dkk. 2002. *Otonomi Daerah*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.